

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA BAUBAU

Khayatun Nufus

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu, Jakarta Selatan

Email: nufus_awal@yahoo.co.id

Abstract

The Government Accounting Standards (SAP) is the accounting principles used for financial reporting and Government Performance. Regional autonomy encourage governments to make regulation in the management and reporting financial statements. The necessity and demands transparency of financial performance provides an overview of importance of local government accounting standards to be applied so that there will be uniformity in the assessment of local government performance. This paper presents the results that the quality of human resources, and political simultaneously significant effect on the implementation of SAP in the Baubau Municipality.

Kata Kunci: Karakteristik SDM, Sistem pemerintahan, Proses politik, Diagram jalur

PENDAHULUAN

Adanya reformasi di Indonesia tahun 1998, yang ditandai dengan penyelenggaraan otonomi daerah menuntut peningkatan daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk itu, keharusan dan tuntutan transparansi kinerja keuangan daerah memberikan gambaran pentingnya standar akuntansi pemerintah untuk diberlakukan sehingga akan ada keseragaman penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut kesungguhan dan komitmen para aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan sebagai

pelaku dan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah bagi yang memerlukan atau pihak yang berkepentingan.

Dengan upaya pemerintah tersebut, ternyata fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan selama lima tahun berturut-turut (2004-2008) memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP/*disclaimer*) terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hal ini menunjukkan banyaknya laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang tidak memenuhi standar akuntansi yang benar. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan pernyataan BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (BPK RI, 2008).

Kondisi ini tampaknya semakin memburuk, sebab secara persentasi LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahun. Pada tahun 2004 LKPD yang mendapat opini WTP 7%, tahun 2005 menurun menjadi 5%, dan tahun berikutnya yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 menjadi hanya 1% saja. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19%. Untuk laporan keuangan tahun anggaran 2008, dari 293 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 8 pemda diberikan opini WTP (2,73%), 217 pemda opini WDP (74,06%), 21 pemda opini TW (7,16%), dan 47 opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (16,04%) (BPK RI).

Pada tahun 2009 Semester II, BPK menyampaikan laporan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebanyak 760 obyek pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu, terdapat temuan kasus ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian, dan temuan kekurangan penerimaan. Dari 760 obyek pemeriksaan tersebut meliputi Obyek Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, Obyek Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan BLU.

Demikian juga berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II tahun 2010. Rincian obyek pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keuangan sebanyak 159 obyek, yaitu LKPD, LK BUMN dan LK Badan lainnya dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Berdasarkan pemeriksaan tersebut, banyak ditemukan kasus-kasus, diantaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, temuan administrasi, ketidakhematan, dan temuan ketidakefisienan (BPK RI, 2010).

Untuk melaksanakan dan menerapkan standar akuntansi yang sudah ditentukan, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang handal sehingga mampu menyusun laporan keuangan pemerintahannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Muindro (2010), Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang berkaitan dengan anggaran negara. Akuntansi pemerintahan dilaksanakan baik oleh unit-unit pemerintah (eksekutif) dan juga oleh lembaga legislatif dan yudikatif sepanjang membebani anggaran negara. Akuntansi pemerintahan mencatat dan melaporkan transaksi kegiatan anggaran negara berupa pendapatan (*revenues*) dan belanja (*expenditures*), pembiayaan (*financing*).

Muindro (2010) menjelaskan bahwa tujuan SAP adalah:

1. Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar, praktek, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, instansi dan lembaga yang secara nasional berguna sebagai dasar penilaian kinerja, menentukan kegiatan otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah pusat dan instansi/lembaga secara keseluruhan.
4. Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien dan efektif.

Dengan demikian, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan berdasarkan PP. No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti, seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan

dengan menggunakan SAP. Dengan demikian, SAP merupakan keharusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Secara teknis, SAP diatur pula dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAK) No. 45 yang mengatur tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba, laporan keuangan yang dihasilkan, unsur-unsur laporan keuangan, dan standar akuntansi pemerintahan. Berikut ini adalah PSAP sebagaimana PP. No. 8/2006.

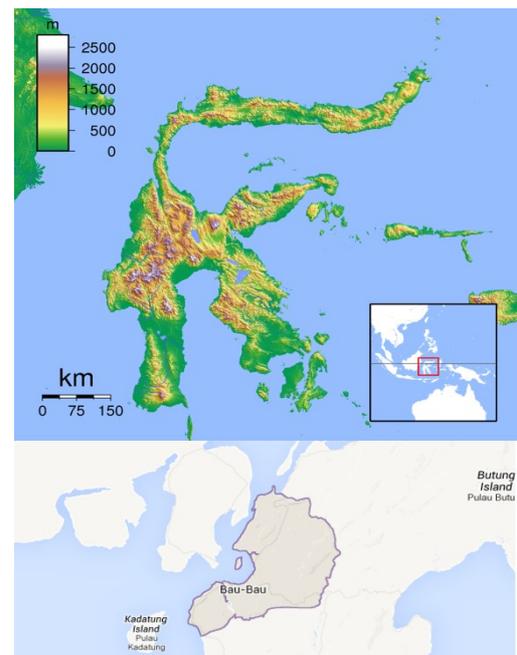
1. PSAP No. 01: Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 02: Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No. 03: Laporan Arus Kas
4. PSAP No. 04: Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05: Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 06: Akuntansi Investasi
7. PSAP No. 07: Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No. 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No. 09: Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No. 10: Akuntansi tentang Koreksi Kesalahan
11. PSAP No. 11: Laporan Keuangan Konsolidasian

Namun demikian, untuk mewujudkan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam penguasaan ilmu akuntansi (Siregar, 2008). Kemampuan SDM merupakan hal yang penting dalam membuat laporan keuangan daerah yang berguna sebagai informasi bagi lingkungan pemerintah daerah tersebut, maupun sebagai informasi yang penting dalam penilaian yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BPK.

Sejalan dengan (Siregar, 2008), Sugijanto *et*

al (1996) juga menyatakan bahwa ada tiga pilar yang harus dipahami dalam menjalankan sistem keuangan daerah secara baik, yaitu: (1) struktur pemerintahan; (2) karakteristik SDM dan (3) proses politik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa rata-rata pemerintah daerah belum mampu menyusun laporan keuangan pemerintahannya dengan benar karena masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki pemerintah tersebut, serta masih rendahnya komitmen mereka untuk melaksanakan perubahan peraturan tentang keuangan pemerintah (Azhar, 2008).



Gambar 1. Peta Kota Baubau, Prov Sulawesi Tenggara

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP pada Pemerintah Kota Baubau. Kota Baubau adalah daerah otonom yang dibentuk berdasarkan UU. No. 13/2001 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelas (*explanatory research*) yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel tertentu melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1989). Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah beserta modelnya (Gambar 2) seperti tampak ilustrasi berikut ini.

1. Variabel terikat

Y_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

2. Variabel Bebas

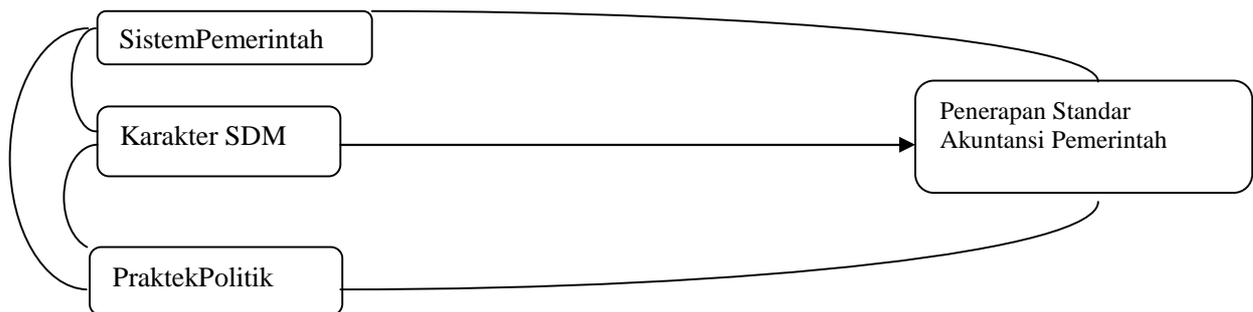
X_1 : Sistem Pemerintah

X_2 : Variabel Sifat SDM

X_3 : Variabel Proses Politik

3. Variabel Intervening

X_4 : Kinerja Keuangan



Gambar 2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini populasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bau-bau yang berjumlah 32. Unit observasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Staf Kota Bau-bau yang berjumlah 96 orang. Penelitian ini menggunakan skala rating (*rating scale*), yaitu skala yang menunjukkan urutan antara data yang satu dengan data yang lain, dengan memberi bobot pada masing-masing urutan, sehingga dapat dibuat/dioperasionalkan melalui perhitungan statistiknya. Teknik analisis datanya dengan menggunakan korelasi sederhana dan korelasi berganda, serta regresi sederhana dan regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Karakteristik SDM, Sistem Pemerintah dan Proses Politik terhadap Penerapan SAP

Variabel penelitian ini terdiri dari karakter/kualitas SDM (X_1), sistem pemerintah (X_2) dan Politik (X_3). Pada penelitian ini ketiga dimensi tersebut menjadi variabel bebas dan koefisien korelasi diantara ketiga variabel tersebut disajikan pada tabel 1. Berdasarkan nilai koefisien korelasi pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa: *pertama*, hubungan antara karakter/kualitas SDM (X_1), sistem pemerintah (X_2) sebesar 0,3654 dan termasuk dalam kategori rendah. *Kedua*, hubungan antara karakter/kualitas SDM proses politik sebesar 0,1864 juga termasuk dalam kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 20 diperoleh koefisien jalur dari masing-masing sub-variabel karakter/kualitas SDM, sistem pemerintah, dan politik, terhadap penerapan SAP sebagai berikut.

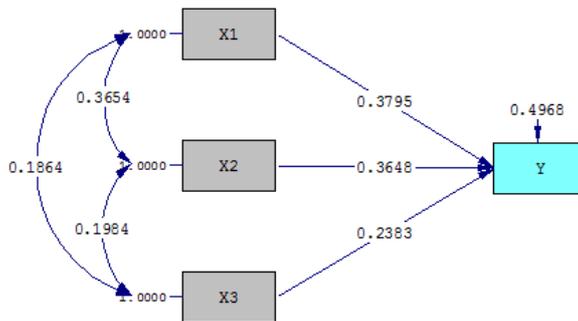
Tabel 1. Koefisien Jalur Variabel Independen terhadap Penerapan SAP

Variabel	Koefisien Jalur	T_{hitung}	$R^2 = 0,5032$
Karakter/kualitas SDM (X_1)	0,3795	3,7212	
Sistem pemerintah (X_2)	0,3648	3,5683	

Tabel 1. Lanjutan

Politik (X ₃)	0,2383	2,4599	
---------------------------	--------	--------	--

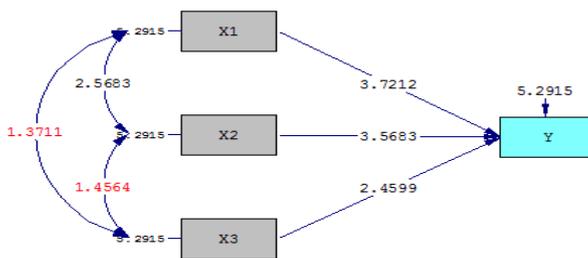
Sumber: data diolah



Gambar 3. Diagram Jalur Ketiga Variabel terhadap Penerapan SAP

Secara bersama-sama ketiga variabel yaitu karakter/kualitas SDM, sistem pemerintah dan politik memberikan pengaruh sebesar 50,32% terhadap penerapan SAP di Pemerintah Kota Baubau. Sedangkan sisanya sebesar 49,68% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel tersebut. Jika dilihat masing-masing variabel, karakter/kualitas SDM mempengaruhi penerapan SAP sebesar 37,95%; sistem pemerintah mempengaruhi penerapan SAP sebesar 36,48%; dan politik memberikan pengaruh sebesar 23,83% terhadap penerapan SAP.

Secara visual diagram jalur dari pengaruh ketiga variabel independen terhadap penerapan SAP, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Diagram Jalur dan Uji-t Ketiga Variabel Terhadap Penerapan SAP

Melalui nilai-nilai yang dapat dihitung besar pengaruh masing-masing sub-variabel independen (kompetensi, komitmen, dan politik) terhadap penerapan SAP, yaitu sebagai berikut:

1. Besar pengaruh karakteristik SDM terhadap Penerapan SAP

a. Pengaruh langsung karakteristik SDM terhadap penerapan SAP $= (P_{YX_1})^2 = (0,3795) \times (0,3795) = 0,144$ (14,4%)

b. Pengaruh tidak langsung karakteristik SDM terhadap penerapan SAP karena hubungannya dengan Sistem Pemerintah $= P_{YX_1 X_2} r_{X_1 X_2} P_{YX_2} = (0,3795) \times (0,3654) \times (0,3648) = 0,01920$ (1,9%).

c. Pengaruh tidak langsung karakteristik SDM terhadap penerapan SAP karena hubungannya dengan Proses Politik $= P_{YX_1 X_3} r_{X_1 X_3} P_{YX_3} = (0,3795) \times (0,1864) \times (0,2383) = 0,01686$ (1,7%).

Jadi total karakter/kualitas SDM terhadap penerapan SAP $= 14,4\% + 1,9\% + 1,7\% = 18\%$ dengan arah positif, artinya 18% keberhasilan penerapan SAP disebabkan oleh karakter/kualitas SDM aparat pemerintahan terkait.

2. Besar pengaruh sistem pemerintah terhadap penerapan SAP

a. Pengaruh langsung sistem pemerintah terhadap Penerapan SAP $= (P_{YX_2})^2 = (0,3648) \times (0,3648) = 0,133$ (13,3 %)

b. Pengaruh tidak sistem pemerintah terhadap penerapan SAP karena hubungannya dengan karakteristik SDM $= P_{YX_2 X_1} r_{X_1 X_2} P_{YX_1} = (0,3648) \times (0,1984) \times (0,3654) = 0,026$ (2,6%).

c. Pengaruh tidak langsung sistem pemerintah terhadap penerapan SAP karena hubungannya proses politik $= P_{YX_2 X_3} r_{X_2 X_3} P_{YX_3} = (0,3648) \times (0,1984) \times (0,2383) = 0,017$ (1,7%).

Jadi total pengaruh Sistem Pemerintah terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah = 13,3% + 2,6% + 1,7% = 17,6% dengan arah positif, artinya 17,6% Penerapan Standar akuntansi Pemerintah di pengaruhi oleh Sistem Pemerintahnya.

3. Besar pengaruh proses politik terhadap penerapan SAP dihitung sebagai berikut.

a. Pengaruh langsung politik terhadap penerapan SAP = $(P_{YX_2})^2 = (0,2383) \times (0,2383) = 0,057 (5,7\%)$

b. Pengaruh tidak langsung proses politik terhadap penerapan SAP karena hubungannya dengan karakteristik SDM = $P_{YX_3} \times r_{X_1X_3} \times P_{YX_1} = (0,2383) \times (0,3654) \times (0,3648) = 0,032 (3,2\%)$.

c. Pengaruh tidak langsung proses politik terhadap penerapan SAP hubungannya dengan sistem pemerintah = $P_{YX_3} \times r_{X_2X_3} \times P_{YX_2} = (0,2383) \times (0,01984) \times (0,3648) = 0,017 (1,7\%)$.

Jadi total pengaruh proses politik terhadap penerapan SAP = 5,7% + 3,2% + 1,7% = 10,6% dengan arah positif, artinya 10,6% penerapan SAP dipengaruhi oleh faktor politik.

B. Uji Simultan (Bersama-Sama)

Untuk simultanketiga variabelterhadap Penerapan SAPmaka dilakukan pengujian dengan rumusanhipotesis statistik sebagai berikut.

Ho : $\rho_{YX_i} = 0$ Karakteristik SDM, sistem pemerintah dan proses politik, secara bersama-sama tidak mempengaruhi penerapan SAP.
i = 1,2,3

Ha : $\rho_{YX_i} \neq 0$ Karakteristik SDM, sistem pemerintah dan proses politik, secara bersama-sama mempengaruhi penerapan SAP.
i = 1,2,3

Pengujian terhadap hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji t dengan ketentuan "tolak Ho" jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , atau sebaliknya terima Ho jika t_{hitung} lebih kecil atau sama dengan t_{tabel} . Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R^2) dapat dihitung nilai F menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = \frac{(n - k - 1)R^2_{Y(X_1X_2X_3)}}{k(1 - R^2_{Y(X_1X_2X_3)})}$$

Di mana:

n : jumlah sampel
k : jumlah variabel independen

$$t_{hitung} = \frac{(60 - 3 - 1) \times 0,5032}{3 \times (1 - 0,5032)} = 18,907$$

Dari tabel t untuk tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas (3,56) diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,679. Karena t_{hitung} (18,907) lebih besar dibanding F_{tabel} (2,679), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel yang meliputi karakteristik SDM, sistem pemerintah dan proses politiksecara simultan berpengaruhsecara signifikan terhadap Penerapan SAP di Pemerintah Kota Baubau.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan mendasarkan pada teori yang dikemukakan para ahli, ada beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi penerapan SAP, yaitu: sistem pemerintah, karakteristik SDM, dan proses politik.
2. Sistem pemerintah, karakteristikSDM, dan proses politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP di Pemerintah Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13/2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4012/1/08E00200.pdf>, diakses 1 Januari 2014
- Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit PT Mitra Wacana, Jakarta
- Singarimbun, M., et al., 1989, *Metode Penelitian Survey*, Cet. Ke-18, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Siregar, N.B., 2008, Pengaruh Luas Daerah, pendidikan, Pengalaman, Pelatihan Formal Akuntansi, Dan kinerja Keuangan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Utara, *Jurnal Akuntansi* 2008, Yayasan Bina Mitra Wawasan & FISIP Universitas Sumatera Utara
- Sugijanto, 2002, Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU. No. 22-25/1999, *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX, No. 1